

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap data panel 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dibuktikan dengan  $t$  hitung dengan nilai sig 0,001 ( $< 0,05$ ) artinya peningkatan PDRB sebesar 1% diikuti peningkatan tingkat kemiskinan 0,068%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan teori *trickle-down effect* yang berasumsi secara otomatis menetes ke kelompok masyarakat miskin. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi habis oleh kelompok menengah ke atas sehingga ketimpangan tinggi dan kemiskinan tidak berkurang secara substansial.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dibuktikan oleh  $t$  hitung dengan nilai sig 0,001 ( $< 0,05$ ) yang artinya setiap kenaikan pengangguran 1% menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0,223%. Hal ini sejalan dengan teori *Keynesian*, yang menyatakan bahwa pengangguran adalah salah satu sumber utama kemiskinan dan stagnasi ekonomi. Dalam pandangan *Keynes*, intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja agar kesejahteraan dapat meningkat secara merata.
3. APBD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dibuktikan dengan  $t$  hitung dengan nilai sig 0,210 ( $> 0,05$ ). Belanja pemerintah tidak mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaktepatan sasaran dalam alokasi dan implementasi anggaran, lemahnya efektivitas birokrasi, atau tidak tersalurkannya anggaran kepada kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaktepatan sasaran dalam alokasi dan implementasi anggaran, lemahnya efektivitas birokrasi, atau tidak tersalurkannya anggaran kepada program

sosial, subsidi, maupun pembangunan infrastruktur, sebagaimana dalam teori fiskal.

4. Secara simultan, PDRB, TPT, dan APBD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai  $t$  hitung dengan nilai sig 0,000 ( $< 0,05$ ) dan koefisien determinasi sebesar 31,4%. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sekitar sepertiga dari variasi kemiskinan di Jawa Barat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, akses keuangan, dan ketimpangan distribusi aset

## **B. Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat:

1. Dalam mengejar pengentasan kemiskinan pemerintah direkomendasikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga turut memperhatikan redistribusi pendapatan yang terjadi agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata, sehingga dapat menekan angka kemiskinan.
2. Pemerintah direkomendasikan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk program ekonomi pembangunan yang bersifat membuka lapangan pekerjaan guna menyerap tenaga kerja dan menurunkan pengangguran.
3. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk meningkatkan anggaran belanja daerah program pengentasan kemiskinan yang bersifat terorganisir dengan baik.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitiia diantaranya meliputi:

1. Variabel yang digunakan untuk menganalisis kemiskinan hanya Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Realisasi pengeluaran APBD. diharapkan penelitian berikutnya dapat menambah pengguna'an variable lain yang berkontribusi besar dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan
2. Penelitian ini menggunakan data Panel dari 2020-2024 yang menganalisis secara global 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sehingga direkomendasikan

kepad peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan per Kabupaten/Kota dalam periode tertentu.

